

Peran Dinas Koperasi Dan UMKM Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Surabaya

Daniar Pramesti Ningrum

*Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: Daniarprmst24@gmail.com*

M. Kendry Widiyanto

*Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: kenronggo@untag-sby.ac.id*

Tri Yuliyanti

*Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: triyuli@untag-sby.ac.id*

Abstrak

Peran Dinas Koperasi dan UMKM sangat berpengaruh dalam pemberdayaan UMKM di Kota Surabaya. Mengingat UMKM berpotensi tinggi akan perekonomian, membuat Pemerintah ikut andil dalam hal pemberdayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan UMKM serta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini memfokuskan pelaksanaan pemberdayaan UMKM serta faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan UMKM sudah merata namun dalam menangani pertumbuhan iklim usaha belum terlaksana dengan baik. Saran yang diberikan adalah meningkatkan kinerja dalam menunjang peran Dinkop dalam pemberdayaan UMKM, konsisten dalam peran penumbuhan usaha baru dan pembinaan usaha serta mencari solusi dengan inovasi untuk menstabilkan iklim usaha yang ramah bagi UMKM.

Kata Kunci: *Peranan, Pemberdayaan, Usaha Mikro Kecil Menengah*

Pendahuluan

Salah satu unsur yang berperan penting dalam mencapai tujuan suatu negara adalah pemerintah. Dalam melaksanakan fungsinya, pemerintah harus berjalan dengan semestinya. Rasyid (1996) menyampaikan bahwa pemerintah memiliki 3 fungsi yang hakiki, yaitu: fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Ketiga fungsi ini mempunyai keterkaitan satu sama lain. Dalam negara berkembang yang menjadi prioritas utama adalah pembangunan nasional suatu negara, begitu juga dengan negara kita yakni Indonesia. Dalam pembangunan nasional di Indonesia, bidang ekonomi adalah salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Dalam pembangunan nasional saat ini Pemerintah Daerah berperan penting dalam bidang ekonomi, bukan hanya pemerintah pusat saja.

Dengan adanya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang memiliki kewenangan yang besar dalam meningkatkan potensi daerahnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah perlu dilakukan berbagai macam upaya oleh pemerintah daerah yang lebih kreatif dan inovatif. (Drs. H. Mudji Rahardjo, 2004)

Surabaya adalah ibu kota dari Jawa Timur, yang mana dalam hal perekonomian Surabaya menduduki peringkat yang sangat tinggi. Surabaya memiliki tren pertumbuhan ekonomi yang sangat positif, salah satunya yakni adanya Usaha Mikro Kecil Menengah yang tersebar disegala penjuru kota Surabaya. Adanya UMKM ini sebagai penopang

perekonomian bagi kota Surabaya sebesar 98%, sisanya yakni dari perusahaan-perusahaan besar.

UMKM adalah singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan bahwa kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000. Koperasi dan UMKM Kota Surabaya merupakan peranan penting dalam pembangunan ekonomi lokal. Salah satu bagian penting dari perekonomian daerah yang ada di Surabaya yakni adanya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). UMKM ini merupakan salah satu kelompok perekonomian di kota Surabaya.

UMKM merupakan badan usaha perorangan yang terdiri dari usaha mikro, kecil dan menengah. UMKM sendiri memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan ekspor, peningkatan dan pemerataan pendapatan, pembentukan produk nasional serta perluasan kesempatan kerja. Wujud kehidupan ekonomi di Indonesia karena usaha kecil. Sehingga UMKM ini tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi secara nasional. (Ii & Umkm, 2008)

Dalam menumbuhkan perekonomian nasional diperlukan peranan industri kecil dan menengah sesuai yang ditetapkan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Undang-Undang ini mengatur bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu dilaksanakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan yang seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Dari tahun-ketahun perkembangan UMKM di Kota Surabaya mengalami perkembangan yang cukup pesat. Terbukti data yang dapat disajikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1 Jumlah UMKM Kota Surabaya Tahun 2015-2018

TAHUN	JUMLAH ORANG YANG MEMPUNYAI UMKM	UMKM
2015	27.926	25.353
2016	28.391	25.147
2017	28.759	26.037
2018	29.507	26.800

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya

Dari tabel data 1 menurut Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah disebutkan UMKM di Surabaya sebanyak 29.507 usaha. Dalam perkembangan UMKM

tidak bisa lepas dari peran pemerintah, salah satunya yakni Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surabaya yang memiliki peran yang sangat penting.

Untuk memaksimalkan kinerja dan pertumbuhan usaha kecil perlu untuk mengetahui peranan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam kebijakan program pembinaan yang telah dan ataupun yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Berdasarkan realitas dan penjelasan diatas merupakan suatu hal yang menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang bagaimana dan seperti apa peran pemerintah, khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM di Kota Surabaya serta apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mendukung proses tersebut.

Masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surabaya dalam pemberdayaan UMKM di Kota Surabaya dan apa faktor pendukung dan penghambat peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam memberdayakan UMKM di Kota Surabaya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memfokuskan pada peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya dalam pemberdayaan UMKM dan faktor pendukung maupun penghambat dalam proses pemberdayaan UMKM tersebut. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya Jl. Tunjungan 1-3 Surabaya dan Sentra UKM Merr. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Analisa data penelitian ini menggunakan model Miles dan Hubberman yakni proses pengumpulan data dilakukan 3 kegiatan penting diantaranya reduksi data, penyajian data, verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

a) Perumbuhan Iklim Usaha

Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat dianalisis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 ayat 9 Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundangundangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Seperti yang diungkapkan oleh staff Dinkop Surabaya, bahwa kondisi dunia usaha di Surabaya dalam mendukung stabilitas iklim usaha banyak yang mengalami penurunan omset sehingga kondisinya tidaklah stabil dikarenakan banyak dari mereka yang kehilangan pelanggan seperti waktu awal-awal bisnis mereka berdiri. Namun, banyak

juga sektor usaha yang membangun bisnis sampingan untuk mendukung stabilitas iklim usaha saat ini.

Sedangkan bagi pelaku usaha umkm sendiri dalam menghadapi persaingan di Kota Surabaya ini dilakukan dengan banyak hal, seperti mengembangkan produk-produk mereka dengan berbagai macam inovasi, meningkatkan kualitas setiap produk hingga memasarkan produk-produk mereka ke marketplace dan sosial media lainnya.

b) Pertumbuhan Unit Usaha Baru

Dilihat dari teori pemberdayaan, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya melakukan berbagai cara untuk menerima dengan baik usaha-usaha baru bagi pelaku umkm yang mulai terjun di dunia usaha ini. Peningkatan pertumbuhan umkm tentu terjadi dan sangat signifikan hal ini dibuktikan dengan adanya pertumbuhan sekitar 1581 umkm baru di rentang tahun 2016-2019 hal ini membuktikan bahwa ada perkembangan yang positif dengan adanya pelatihan-pelatihan yang Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya adakan.

Terkait dengan kemudahan akses dalam sumber daya produktif terutama permodalan usaha bagi pelaku usaha umkm yang baru maupun lama, persyaratannya sangat mudah dan tidak dipersulit. Ini merupakan bentuk pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya dalam menghadapi maraknya pertumbuhan unit usaha baru.

c) Pembinaan Usaha

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memberdayakan pelaku UMKM dalam hal memberikan pembinaan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan pemasaran online serta pelatihan manajemen keuangan. Hal tersebut dilakukan agar kualitas sumber daya manusia pengusaha pelaku usaha umkm ini meningkat dalam mengelola usahanya. Seperti yang dikemukakan Pearson *dalam* Prasetyo (2015). Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Karena banyak pelaku usaha umkm yang turut serta mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya yang berguna menambah wawasan dan ketrampilan sumber daya manusia dalam mengembangkan usaha mereka.

d) Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya pasti berhubungan erat dengan faktor pendukung dan juga faktor penghambat, baik itu dari dinas maupun dari pelaku usaha umkmnya.

Adapun faktor pendukung dari Dinas Koperasi seperti bantuan permodalan untuk pelaku usaha UMKM sehingga usaha mereka bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua memudahkan pelaku usaha UMKM supaya mendapat ide-ide baru untuk bisnis mereka. Dari penyajian data yang saya jelaskan tadi, pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya sudah sesuai dengan realita yang ada.

Dalam proses pemberdayaan tidak selalu berjalan dengan sesuai yang diharapkan, banyak sekali faktor yang menghambat keberhasilan suatu pemberdayaan tersebut yaitu

yang pertama dibutuhkan sumber daya manusia yang baik untuk mengevaluasi pelaku usaha yang tidak mengikuti aturan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya dan demi kelancaran bisnis bagi pelaku usaha umkm itu sendiri. Yang kedua bagi pelaku usaha umkm adalah susahnya mempromosikan produk mereka di pasaran sehingga semua pelaku usaha umkm belum menerapkan yang mereka peroleh dari pelatihan-pelatihan yang diajarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Koperasi telah menjalankan perannya dalam pemberdayaan UMKM dengan cukup baik. Penyimpulan tersebut dilandasi hasil penelitian yang mengacu pada tiga indikator peran Dinkop dalam pemberdayaan UMKM yaitu pertumbuhan iklim usaha, pertumbuhan unit usaha baru dan pembinaan usaha. Dari pembahasan hasil penelitian hanya menunjukkan bahwa peran Dinkop dalam menstabilkan pertumbuhan iklim usaha menjadi satu – satunya indikator yang belum terlaksana dengan baik. Faktor pendukung dalam memberdayakan UMKM di Kota Surabaya yakni modal dari Dinkop Surabaya kepada pelaku usaha UMKM dan memberikan banyak pelatihan-pelatihan bagi UMKM agar produk mereka berkembang. Namun, bagi pelaku usaha UMKM masih ditemukan faktor penghambat dalam mengembangkan produknya karena realitanya mereka terkadang tidak menerapkan pengetahuan yang diajarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Menengah Kota Surabaya.

Saran yang dapat diberikan adalah Meningkatkan kinerja dalam menunjang peran Dinkop dalam pemberdayaan UMKM, konsisten dalam peran penumbuhan usaha baru dan pembinaan usaha serta mencari solusi dengan inovasi untuk menstabilkan iklim usaha yang ramah bagi UMKM. Dilihat dari faktor penghambatnya harusnya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya memberikan evaluasi kepada pelaku usaha UMKM apa mereka sudah menerapkan semua yang diajarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah kota Surabaya dalam mengelola dan mengembangkan usahanya.

Daftar Pustaka

- Drs. H. Mudji Rahardjo, S. (2004). No Title *الفرقة*. *CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison, 2004, 352.*
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract>
- Hafsah, M. Jafar. (2004) *Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)*. Diakses pada tanggal 3 April 2013 pukul 22.15 WIB dari www.smecca.com
- Diva, G. (2009). *Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta*. Jakarta: Bakrie School of Management.
- Fahrizal. (2011). *Bab II. Peranan Organisasi*.
- Nirwana, C. D., Muhammadiyah, & Hasanuddin, M. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Enrekang. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*.
- Sunariani, N. N., Suryadinatha, A. O., & Mahaputra, I. I. (2017). *Pemberdayaan Usaha*

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Binaan di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*.

Ii, B. A. B., & Umkm, A. K. (2008). *No Title*. 24–56.

Wardani, H. (2013). Peranan Dinas Koperasi Dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(2), 213–220.